



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08/DPR RI/II/2011-2012

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS
TAHUN 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2012;
- b. bahwa menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5043);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 15 tanggal 16 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Desember 2011
KETUA,
ttd

DR. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 08/DPR/II/2011-2012
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2011

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS
 TAHUN 2011**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
2	RUU tentang Penanganan Konflik Sosial	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
3	RUU tentang Organisasi Masyarakat	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
4	RUU tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
5	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV
6	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV
7	RUU tentang Pangan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV
8	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI
9	RUU tentang Pendidikan Tinggi	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X
10	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
11	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	PEMERINTAH	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I
12	RUU tentang Keamanan Nasional	PEMERINTAH	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I
13	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PEMERINTAH	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
14	RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	PEMERINTAH	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
15	RUU tentang Koperasi	PEMERINTAH	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI
16	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	PEMERINTAH	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
17	RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan	DPR	RUU sudah menjadi usul DPR
18	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR	RUU sudah menjadi usul DPR
19	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR	RUU sudah menjadi usul DPR
20	RUU tentang Jalan	DPR	RUU dalam tahap harmonisasi
21	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I
22	RUU tentang Pertanahan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi II
23	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III
24	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V
26	RUU tentang Pencarian dan Pertolongan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V
27	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
28	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII
29	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII
30	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII
31	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX
32	RUU tentang Keperawatan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX
33	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX
34	RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X
35	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI
36	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
37	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
38	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
39	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
40	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
41	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
42	RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
43	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
44	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
45	RUU tentang Lambang Palang Merah	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
46	RUU tentang Keinsinyuran	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
47	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
48	RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
49	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama
50	RUU tentang Desa	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
51	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
52	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
53	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
54	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
55	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
56	RUU tentang Tenaga Kesehatan	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Kesehatan
57	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan
58	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Usaha Perasurasian		Keuangan
59	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB
60	RUU tentang Perdagangan	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perdagangan
61	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perindustrian
62	RUU tentang Veteran	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan
63	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan/ Lamsaneg
64	RUU tentang Keantariksaan	PEMERINTAH	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ LAPAN

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

KETUA,

ttd

DR. H. MARZUKI ALIE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10A/DPR RI/I/2012-2013

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/II/2011-2012 telah ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012;
- d. bahwa Rapat Kerja badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 September 2012 telah menyepakati 5 (lima) rancangan Undang-Undang Tambahan untuk dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Program Legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012, dan telah disetujui penetapan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tersebut dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 pada Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2012;
- e. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, diapandang perlu menetapkan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/II/2011-2012 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 3 tanggal 30 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012
- PERTAMA : Menetapkan 5 (LIMA) Rancangan Undang-Undang Tambahan dalam Program Legislasi Nasional rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

12. Pimpinan DPR RI;
13. Ketua DPD RI;
14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
15. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
16. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
17. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
18. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;
19. Sekretaris Jenderal DPR RI;
20. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI;
21. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
22. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2012

KETUA,
ttd

DR. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10A/DPR RI/I/2012-2013
TANGGAL : 30 Agustus 2012

**DAFTAR 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012**

NO	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN
1	RUU tentang Kesehatan Jiwa	DPR
2	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR
3	RUU tentang Kebudayaan	DPR
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
5	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pemerintah

KETUA,

ttd

DR. H. MARZUKI ALIE